



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Gebrakan Heru Taktis atau Politis?

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapat sorotan lantaran banyak mengubah program dan kebijakan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Apakah langkah Heru itu wajar dan etis sebagai langkah taktis, atau justru politis?

Sejak pekan lalu publik ramai membahas perubahan slogan Jakarta yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di era Anies, slogan berbunyi "Jakarta Kota Kolaborasi," di era Heru diubah menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia." Perubahan slogan Jakarta tersebut hanya satu dari sekian banyak kebijakan yang diambil Heru setelah dua bulan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Atas sejumlah kebijakannya yang dianggap kontroversial, Heru lantas dituding bermain politik praktis. Sebagian menilai Heru seolah ingin menghapus jejak Anies di Jakarta. Sebagian lain menilai langkah Heru hal yang wajar.

((dari Hal 1

Terlepas dari pandangan pro dan kontra publik, mengapa seorang pejabat kepala daerah bisa dengan mudah mengubah atau menghapus program pemimpin sebelumnya? Dari sisi aturan, apakah hal tersebut dibenarkan?

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dan pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo berpandangan bahwa seorang pejabat kepala daerah seharusnya memang tidak melakukan perubahan ekstrem atas program yang telah berjalan.

Endi Jaweng menjelaskan, meskipun kewenangan penjabat kepala daerah hampir sama dengan kepala daerah definitif, tapi perlu disadari bahwa tetap ada rambu-rambu dan batasan-batasan yang mengaturnya. "Jadi, seorang pejabat kepala daerah seharusnya tidak datang untuk mengubah total, atau menggonta-ganti kebijakan secara ekstrem. Prinsipnya dia melanjutkan apa yang sudah bagus dan memperbaiki apa yang kurang," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49/2008 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada batasan kewenangan yang tidak boleh dilakukan penjabat kepala daerah. Kalaupun dilakukan harus atas izin menteri dalam negeri. Misalnya, diatur bahwa seorang penjabat tidak boleh memutasi aparatur sipil negara (ASN) dan tidak boleh mengubah kebijakan mendasar yang ada sebelumnya antara lain soal perizinan.

Endi menguraikan, ada dua rumpun tugas utama penjabat kepala daerah. Dua hal tersebut sekaligus bisa jadi bahan evaluasi untuk mengukur kinerja penjabat kepala daerah selama 1 tahun memimpin. *Pertama*, dia harus memastikan pemilu dan pilkada nasional pada 2024 berjalan secara kondusif. *Ini berkaitan dengan kemampuan* penjabat kepala daerah untuk menjaga netralitasnya dan netralitas aparat sipil negara (ASN) yang dipimpinnya agar tidak terlibat politik praktis.

Kedua, penjabat kepala daerah harus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, terutama yang bersifat jangka pendek. Dua poin penting dalam hal ini, pertama, penjabat kepala daerah harus menuntaskan APBD 2023. *Kedua*, dia harus bisa memimpin pemerintahan atau birokrasi untuk mengatasi per-

masalah konkret warga, yakni mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta mengantisipasi lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Di saat yang sama, penjabat kepala daerah juga harus memastikan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan di daerahnya berjalan baik, menjamin infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat terpenuhi. "Dua hal ini kunci. Selain dari itu, hanya (tugas) tambahan bagi seorang penjabat kepala daerah yang masa kerjanya hanya satu tahun," ucapnya.

Endi menyebut, sejak awal, yakni tahap pengisian penjabat kepala daerah, termasuk penjabat gubernur yang ditunjuk presiden, sudah bermasalah. Pengisian penjabat kepala daerah dilakukan tanpa adanya aturan turunan undang-undang berupa peraturan pemerintah (PP). Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ombudsman sudah memerintahkan perlunya peraturan teknis tersebut. Dia meminta agar PP tersebut segera dibuat karena tahun depan akan ada lagi ratusan orang yang akan ditunjuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong. "Harus ada regulasi agar tidak ada ruang gelap kekuasaan. Sekarang ini kita tidak tahu pertimbangan dan mekanisme yang digunakan dalam mengisi penjabat kepala daerah," desaknya.

Endi menyebut PP yang menjadi rujukan dalam mengangkat penjabat kepala daerah sudah kedaluwarsa karena dibuat pada 2000-an awal, sedangkan undang-undang pemerintahan daerah lahir pada 2014. Karena itu, PP baru sangat diperlukan untuk mempertegas lagi soal penjabat kepala daerah. Di PP baru itu harus diatur mekanisme soal pengangkatan, syarat pengangkatan, batasan dan kewenangan, evaluasi kinerja, bagaimana hubungan penjabat dengan DPRD, serta bagaimana aturan pemberhentiannya.

Perintah Pasal 86 ayat 6 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemerintah pusat harus menyusun PP terkait penjabat kepala daerah. "Sampai sekarang PP itu belum ada," sebutnya.

Dalam pandangan Suko Widodo, kasus seperti Heru yang banyak merombak kebijakan gubernur pendahulunya bisa jadi preseden buruk bagi daerah lain. Apalagi tahun depan ada ratusan daerah yang juga akan memiliki penjabat kepala da-

erah. "Saya melihat ini sebagai arogansi kekuasaan. Khawatirnya ini jadi yurisprudensi bagi penjabat kepala daerah yang lain nanti, bisa dengan leluasa membolak-balikkan kebijakan yang sudah berjalan," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Dia menyarankan kepada DPRD DKI Jakarta segera bersikap dengan memanggil Heru. Untuk itu, DPRD perlu bertanya agar publik jadi paham masalah yang terjadi. DPRD harus responsif dan melihat fenomena tersebut sebagai hal yang tidak lazim dalam sebuah suksesi.

Jika ada yang menilai langkah Heru terkesan politis, Suko menilai itu wajar karena memang daeromaitu. Di menilai langkah Heru bukan hal yang bagus untuk komunikasi politiknya kepada masyarakat. Bahkan, bisa jadi bumerang karena dia dianggap melakukan perlawanan terhadap sistem yang seharusnya diajalankan.

Suko mengingatkan, di pemerintahan berlaku tatanan, regulasi, dan etika. Meskipun secara hukum seorang penjabat kepala daerah bisa saja membuat kebijakan apa pun, termasuk merombak yang dilakukan pendahulunya, etika memberi batasan. "Secara etis seharusnya dia tidak merombak besar karya gubernur lama. Secara hukum mungkin boleh saja, tapi itu akan dicatat sebagai anomali kekuasaan," tekannya.

Ganti Slogan hingga Hapus Jalur Sepeda

Selain mengubah slogan Jakarta, Heru disorot lantaran mengubah konsep Tebet Eco Park. Anies sebelumnya merevitalisasi kawasan itu dengan konsep ruang publik, yakni taman yang bebas diakses publik. Beberapa waktu lalu Tebet Eco Park diganjar penghargaan Gold Award pada ajang *Singapore Landscape Architecture Award 2022*. Di tangan Heru, Tebet Eco Park kini diubah konsepnya. Dengan alasan ingin membatasi jumlah pengunjung, Tebet Eco Park kini diberi pembatas berupa pagar.

Program Anies membangun jalur sepeda hingga ratusan kilometer juga diubah. Alokasi anggaran pengadaan jalur sepeda di RAPBD 2023 Rp38 miliar kini dihapus dan tersisa Rp7,5 miliar untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda.

Langkah Heru yang dimaknai banyak pihak sebagai upaya "menghapus jejak" Anies juga terlihat dengan perombakan pejabat pemerintahan dan direksi BUMD. Heru menghapus



Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Gebrakan Heru Taktis atau Politis?

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Anies. "Saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, memperkuat di asisten, adatinahli, adatenagaahli, kira-kira seperti itu," ujar Heru saat baru-baru dilantik.

Beberapa pekan setelah menjabat Heru juga merombak jajaran direksi MRT Jakarta yang baru diangkat Anies pada Juli 2022. Dia mengganti direksi JakPro dan komisaris PT LRT Jakarta. Sekda Provinsi DKI Jakarta juga diganti.

Tudingan politis lantas mengarah ke Heru di balik kebijakannya yang terkesan "asal beda" dengan gubernur pendahulunya. Anies Baswedan kini maju sebagai bakal calon presiden 2024 yang diusung Partai NasDem.

Namun, pihak Pemprov DKI memiliki alasan tersendiri atas kebijakan yang dibuat Heru. Dalam hal slogan "Sukses Jakarta untuk Indonesia", hal itu diklaim berkaitan dengan upaya Pemprov DKI yang akan menerapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. RPD tersebut merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70/2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Pelaksana Tugas Kepala

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Raides Aryanto Senin (12/12) pekan lalu menjelaskan, slogan baru itu diharapkan mendukung sekaligus mengajak masyarakat Jakarta, untuk bersinergi mengantarkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara. Slogan itu juga nantinya bersanding dengan logo resmi Pemprov DKI, +Jakarta atau Jakarta Plus yang tidak diubah.

Dia mengklaim slogan Jakarta sebelumnya, "Kota Kolaborasi", memiliki semangat yang tetap dilanjutkan dalam program pelaksanaan RPD 2023-2026. Semangat kolaborasi yang sudah terbangun di Jakarta itu diarahkan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dengan berbagai program.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai plus minus dari kebijakan yang telah dilakukan Heru Budi. Misalnya, mengenai penghapusan jalur sepeda dia setuju jika dilakukan evaluasi. Trubus memandang program tersebut di era Anies memakan anggaran daerah yang besar, tetapi tidak menyesuaikan dengan ketersediaan kondisi jalan di Jakarta. Ada beberapa jalur sepeda yang dinilai tepat karena lebar, sedangkan beberapa jalan lain tidak tepat karena kondisi jalan yang sempit. "Masalahnya, sepeda itu masih sebatas hobi, bukan moda transportasi. Jalur itu

enggak terpakai, akhirnya hanya dipakai untuk parkir motor, taksi. Pembatas jalur sepeda juga banyak yang rusak sehingga pemborosan anggaran," tuturnya lagi.

Adapun kebijakan Heru yang dianggap kurang tepat adalah penataan Tebet Eco Park. Dia menyayangkan jika ada pemagaran terhadap area taman tersebut. Sebagai ruang terbuka hijau, kawasan taman semestinya terbuka untuk publik. Selain itu, Trubus berharap Heru Budi bisa melihat skala prioritas terhadap penanganan masalah Jakarta.

Ada dua hal yang dinilai sangat krusial selain persoalan klasik banjir dan kemacetan. Pertama, lapangan kerja. Trubus mengamati tidak adanya upaya penciptaan lapangan kerja yang termasuk dalam APBD DKI Jakarta 2022.

Kedua, kebijakan stabilitas harga sehingga terjangkau oleh masyarakat. Masih banyak warga dengan kondisi ekonomi bawah dengan daya beli yang sangat bergantung terhadap kondisi harga di pasar. "Kalau memang mau dukungan publik ke Pj Gubernur itu kuat, dua tugas utama itu yang dilakukan. Bukan soal masalah banjir, itu siapa pun gubernurnya itu akan sama saja," ungkapnya.

Di lain pihak, kalangan DPRD memandang kebijakan Heru mengganti slogan tidak me-

langgar apa pun sehingga tidak sepatutnya dipersoalkan. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, setiap pemimpin baru pasti ingin memiliki ciri khasnya sendiri. Hal itu juga berlaku pada Heru. "Gubernur-gubernur yang lama, entah Anies atau Ahok, juga mengganti slogan mereka sesuai visi kepemimpinan mereka. Masing-masing memiliki gaya, tidak ada masalah dengan itu, tidak ada yang dilanggar," kilahnya.

Mengenai penghentian anggaran untuk jalur sepeda, Gilbert mengatakan, tidak ada jalur sepeda di Jakarta yang berfungsi efektif. Harus ada langkah penghentian untuk menambah jalur sepeda oleh Dishub DKI Jakarta.

Soal TGUPP yang juga dibubarkan Heru, Gilbert menilai itu perlu agar para ASN tenang bekerja. Karena TGUPP sebagai perantara sebelum sampai ke gubernur dinilai membuat SKPD kebingungan dengan pekerjaannya. Gilbert juga menegaskan bahwa kebijakan Heru sebagai penjabat gubernur tidak didasari unsur politis.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menilai kebijakan baru yang dibuat Heru sebagai hal wajar, asal tidak ada aturan yang dilanggar.

faorick pakkpahan/ananda nararya/bakti munir

TENTANG HERU BUDI HARTONO

- Lahir 13 Desember 1965
- Menjabat Gubernur DKI Jakarta 17 Oktober 2022
- Masa Jabatan 1 Tahun (bisa diperpanjang)
- Jabatan Lain Kepala Sekretariat Presiden
- Jabatan Sebelumnya Wali Kota Jakarta Utara (2014-2015)

Dua bulan sejak dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merombak sejumlah program dan kebijakan Anies Baswedan

- Slogan Jakarta** yang tadinya "Jakarta Kota Kolaborasi" diubah menjadi: "Sukses Jakarta untuk Indonesia".
- Tebet Eco Park** yang semula ruang terbuka yang bebas diakses publik, kini jadi taman yang dibatasi pagar.
- Berencana menanam kembali pohon** di kawasan Monas yang di masa Anies dipindahkan untuk pembangunan plaza dan alun-alun.
- Mengganti Sekda** DKI Jakarta.
- Anggaran pengadaan jalur sepeda** pada 2023 sebesar Rp38 miliar dihapus dan tersisa Rp7,5 miliar untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda.
- Merombak jajaran direksi BUMD**, yakni direksi MRT Jakarta, direksi JakPro, dan mengganti komisaris PT LRT Jakarta.
- Menghapus TGUPP** atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan bentukan Anies dengan alasan ingin mengoptimalkan SKPD.

KORAN SINDO
INFOGRAFIS: KORAN SINDO/BOBBY FIRMANSYAH